

# PERSPEKTIF FILSAFAT SOSIAL BUDAYA TERHADAP PAJAK

Oleh : Slamet Sutrisno.

## Ilmu Pengetahuan dan Pemahaman Manusia.

Kecenderungan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di abad ke XX ini adalah terjadinya spesialisasi dalam berbagai jenis ilmu. Spesialisasi tersebut berjalan pesat sejalan dengan corak obyek yang diselidiki yang juga telah menjadi makin rumit sehingga perincian lebih detail daripadanya tidak dapat dielakkan. Spesialisasi dan bahkan superspesialisasi pun menjadi kebutuhan penting, demi ketepatan analisis dengan penajaman penyelidikan yang menyertakan teknologi canggih.

Pada berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan manusia selaku obyeknya, penajaman penyelidikan terus dilakukan pula, misalnya pada ilmu-ilmu : kedokteran, ekonomi, sosiologi, psikologi. Masing-masing cabang ilmu yang sudah terspesialisasikan itu menyelidiki manusia dengan seringkali kurang menyadari bahwa proporsi penyelidikannya itu hanyalah sebagian kecil saja dari manusia sebagai kenyataan utuh dengan segala pikiran, perasaan dan kehendaknya.

Dengan faedah dan kemustajaban spesialisasi di satu pihak, kecenderungan ilmiah itu membawa kegagalan di lain pihak. Kegagalan itu terwujud misalnya dalam kenyataan bahwa tidak satupun cabang ilmu kini bisa diandalkan sebagai satu-satunya panacea bagi persoalan manusia dan problem kemasyarakatan. Maka itu akan keliru adanya sikap mengkul-tuskan sesuatu cabang ilmu sebagai dianggap layak menjadi 'tuan' bagi berbagai cabang ilmu lainnya. Dewasa ini masalah kemiskinan tidak pernah berhasil dipecahkan hanya oleh ilmu ekonomi. Masalah kesehatan masyarakat, demikian pula tidak cukup dihadapi hanya oleh dunia kedokteran. Pendek kata berbagai disiplin ilmu itu masing-masing secara terpisah telah gagal memahami apa dan siapanya manusia.

Bahkan dengan kecenderungan pengembangan metodologi kuantitatif dalam dunia ilmiah, manusia sebagai kenyataan seutuhnya terpisah-pisahkan begitu rupa sehingga seringkali manusia malahan diasingkan dari problem kongkretnya sendiri. Lebih dari itu, bahaya kuantifikasi metodologis yang berlebihan dalam dunia keilmuan dewasa ini adalah keterasingan ilmu itu sendiri terhadap permasalahan manusia yang sifatnya kompleks dan bulat. Dikatakan oleh Herbert Marcuse : "The quantification of nature, which led to its explication in terms of mathematical structures, separated reality from all inherent ends and, consequently the true from the good, science from ethics " (Herbert Marcuse, 1964).

Bagaimana sebuah ilmu pengetahuan berkembang tanpa ia berhasil memecahkan problematik yang dihadapi secara sebanding dilukiskan dengan baik oleh Mubyarto; " Akhirnya dinyatakan kekhawatiran bahwa masalah kemiskinan ini akan menjadi semacam komoditi atau obyek studi yang menarik : buku-buku diterbitkan dan dokter dihasilkan, namun masalah kemiskinan itu sendiri tidak dapat dipecahkan." (Prof. Dr. Mubyarto, 1980).

### Pemahaman Manusia Menurut Ilmu Filsafat.

Filsafat berusaha memahami secara utuh segala obyek penyelidikannya. Sebaliknya dari mengurai dan memecah-mecah filsafat bergerak mengembalikan obyeknya kepada kebulatan semula. Berbeda dari kecenderungan ilmu-ilmu lainnya yang secara metodologis bekerja secara induktif-kuantitatif, filsafat menelaah obyeknya secara deduktif kualitatif atas dasar logika dan epistemologi (teori pengetahuan). Dengan cara sedemikian itu, filsafat kurang berkaitan dengan data yang bersifat statistis dan lebih merenungkan dari sudut hakekat. Dan bila dibicarakan hakekat manusia, yang dimaksud adalah manusia universal yang hidup kapan dan di mana saja. Pengertian hakekat mengatasi kendala ruang dan waktu, berlaku umum dan sifatnya abstrak.

Sebelum hakekat manusia itu dirumuskan, perlu ditegaskan bahwa pandangan yang mengutamakan pera

nan manusia dalam memecahkan problem kehidupan sudah berlangsung sejak lama. Jika kini dikatakan bahwa "segala sesuatunya akan bergantung kepada sang manusia", adagium semacam itu sudah bergaung sejak abad-abad sebelum Masehi. Di Yunani Kuno, paham yang mengutamakan faktor manusia disebut aliran Sophisme. Teori kaum Sophis menyatakan bahwa : "man, every man, is the measure of all things, of the existence of the things that are and the non-existence of things that are not (Pof. Dr. C. A. van Peursen, 1981).

Maka itu kenyataan yang terdapat dalam lingkup kehidupan manusia menurut pandangan Sophisme diukur secara subyektif dengan kemungkinan-kemungkinannya yang saling berbeda.

"When the wind blows, it will be perceived as chilly by a man with a fever, but to another man the same wind will appear exhilarating .... If the wind appears chilly one man and exhilarating to another, what quality belongs to the wind itself " (Ibid).

Sophisme hanyalah contoh dari sebuah pandangan mengenai bagaimana manusia memandang hakekat segala sesuatu. Di situ dinyatakan bahwa hakekat segala sesuatu bersifat subyektif dan relatif. Manusia mempunyai kewenangan mutlak untuk menilai seluruh kenyataan dalam lingkup kehidupan. Hakekat manusia adalah "ukuran bagi segala-galanya"

Tokoh-tokoh pemikir lain di jaman Yunani Kuno itu belum tentu sependapat dengan jalan pikiran kaum Sophis. Salah seorang filsuf besar bernama Plato (427-347 SM), adalah ahli pikir yang dikenal dengan aliran Idealisme Klasik. Yang hakiki pada manusia adalah jiwa atau kenyataan rohaniannya, yang dianggap sudah lebih dulu ada daripada jasmani. Kekalnya jiwa manusia meskipun manusia sudah mati, merupakan bagian dari pandangan Plato sebagai implikasi dari filsafat Idealisme yang dikembangkannya. Adapun maksud Plato bukan saja menegaskan perbedaan besar antara jiwa dan tubuh, tetapi terutama membawa manusia sampai pengakuan teoritis dan praktis tentang keluhuran jiwa di atas tubuh

(Prof. Dr. van Peursen, 1981). Maka itu dapat dikatakan bahwa menurut Plato, manusia pada hakekatnya adalah makhluk rohani dengan segala citra idealnya -- dengan resiko adanya gambaran manusia yang sangat teoritis idealis dan kurang menampilkan citra manusia konkrit.

Karangan ini akan mengikuti teori hakekat manusia yang dikembangkan oleh Notonagoro, dengan konsepsinya mengenai manusia monopluralis. Yang dimaksudkan adalah sosok manusia utuh integratif meskipun terdiri dari berbagai dimensi. Menurut Notonagoro manusia mempunyai tiga jenis hakekat sebagai (Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H. 1967):

- Hakekat susunan : manusia itu terdiri dari kesatuan jiwa dan raga.
- Hakekat sifat : manusia itu terdiri dari kesatuannya sebagai individu dan sosial.
- Hakekat kedudukan: manusia itu merupakan kesatuan dengan kedudukan sebagai pribadi mandiri dan makhluk Tuhan .

#### Hubungan Manusia dan Masyarakat.

Bagian ini menguraikan hubungan antara manusia dengan masyarakat, dan dikonsentrasikan dengan problem hakekat manusia menurut sifatnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hubungannya dengan tema karangan ini, tekanan akan diberikan kepada dimensi sosial manusia. Sosial di sini berarti masyarakat (socius) yakni suatu entitas kelompok manusia yang menyusun kaidah-kaidah tertentu sebagai landasan dari usahanya membangun kebersamaan dalam kehidupan. Justru salah satu jalan penting bagaimana sebaiknya manusia dapat dipahami adalah melalui dimensi sosialitas tersebut. Dikatakan oleh Francis E. Merrill :

"Man is both a social and cultural animal and his behavior can be fully grasped only in this double contex. During his social development in a particular cultural setting, he develops a personality that has certain qualities in common with other members of the society, as well as certain qualities unique with him " (Francis E.

Marril, 1957)

Akan sukar dimengerti bahwa manusia -- dalam arti individu -- sanggup membangun keberadaannya di dunia ini tanpa konteks masyarakat, kecuali dia sedang memerankan diri sebagai pertapa. Bahkan dalam keluargapun seseorang hidup dalam komunitas tertentu yang disebut dengan masyarakat kecil. Keluarga adalah sel masyarakat yang terkecil, tetapi yang justru besar peranannya bagi sosialisasi individu. Sesudah keluarga, seorang individu akan menemukan lingkungan kehidupan sosial yang lebih luas berupa masyarakat umum namun demikian dalam lingkup kemasyarakatan itu orang menampilkan individualitasnya dalam artian ia mempunyai identitas, mempunyai kepribadian. Kenyataan ini akan didinamisasikan terus menerus melalui pertemuan antara individualitas (pribadi) dengan sosialitas (masyarakat). Di situ setiap individu akan dituntut kesanggupannya membangun konformitas lewat interaksi antar individu maupun antara individu dan masyarakat.

"Social interaction is a continuous and reciprocal series of contacts between two or more socialised human beings, These contacts may be phisically to the other; more often they are symbolic, is the sense that each person exchanges symbolic meanings with the other, in the form at language or often significant geatures. A society exist when many persons interact regularly and continously on the basis expectations of behavior whose meanings have previosly established" (Francis E. Meril. )

#### Gejala Hidup Kelompok.

Naluri manusia untuk hidup berkelompok berkembang secara sadar yang menimbulkan fenomena suku, marga, bangsa dan negara. Dengan adanya perasaan senasib muncullah parasaan kebangsaan yang pada gilirannya membentuk negara. Sekalian warganya tahu bahwa hak dan kewajiban mereka akan dilettakkan di bawah kepentingan umum yang tidak boleh melemahkan perasaan kebangsaan dan mengancam ke-

beradaan negara. Dengan kekuasaan yang dimilikinya negara mengatur dan memenuhi hak warganya, sebaliknya pula ia memaksa dilaksanakannya kewajiban warga kepada negara,

Dari sudut filsafat politik secara garis besar dapat dikemukakan bahwa asal usul kekuasaan negara itu bermula dari kesediaan warganya memberikan kedaulatan itu baik dalam arti individual maupun kolektif. Di dunia barat berkembang teori berdasar aliran Individualisme dengan menerima asumsi keunggulan perseorangan yang menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk negara. Di kalangan masyarakat Timur dianut aliran pikiran kolektif yang bersendikan filsafat kekeluargaan.

Teori kekuasaan negara di barat itu bertolak dari ajaran Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang disebut Kontrak Sosial. Untuk mengetahui pikiran-pikiran Rousseau dalam bidang sosial dan politik, bukunya yang terpenting ialah Contract Social (1762). Negara berdasarkan suatu 'kontrak sosial', persetujuan yang dilakukan individu-individu untuk memungkinkan hidup bersama secara damai. (Dr. K. Bertens, 1976)

Berpangkal pada pikiran ini, maka mula-mula dicarinya jawaban pertanyaan tadi (tentang asal kekuasaan negara) dengan mengutarakan seolah-olah orang-orang yang bernegara itu mengadakan kontrak perpindahannya dari status naturalis (individu-individu terpisah) ke status civilis (sesudah kontrak) (Dr. K. Bertens, 1976).

Lebih lanjut seperti ditegaskan sendiri oleh Rousseau, dengan kontrak sosial orang kehilangan kebebasan alaminya dan haknya yang tak terbatas yang sudah mengikat serta dapat dicapainya. Sebagai imbalannya ia memperoleh kebebasan sipil yang dibatasi oleh kehendak umum serta hak memiliki (prepietorship) segala yang dipunyainya (Jean Jacques Rousseau) 1986).

Sementara itu dalam alam pikiran Timur yang tidak berpangkal pada Individualisme melainkan pikiran kekeluargaan kekuasaan negara tidak dia-salkan dari kontrak individu-individu. Kekuasaan

negara diasumsikan berasal dari Tuhan dengan postulat wahyu bagi seorang pemimpin sesuai dengan perasaan subyektif sang pemimpin maupun perasaan rakyat banyak. Sedemikian rupa sehingga pemimpin tersebut dipandang layak memegang tampuk pimpinan negara.

### Filsafat Pancasila.

Di Indonesia Pancasila dikenal sebagai dasar filsafat negara. Ini berarti bahwa negara dengan segala kekuasaan yang ada padanya tidak berdiri di atas paham Individualisme, melainkan berpangkal pada paham kekeluargaan atau gotong royong. Tolak pangkal kekeluargaan inilah yang menjadi tolak pangkal pemikiran Pancasila dan pula dalam pemikiran kita mengenai organisasi negara. (Prof. Mr. Soedirman Kartohadiprodo).

"Alam pikiran Pancasila dengan tolak pangkalnya kekeluargaan ini, yang selaras dengan isi jiwa bangsa Indonesia diterapkan dalam hubungan manusia sehari-hari dalam bahasa Jawa dilukiskan dengan kata-kata --dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan -- yang artinya ialah bukan anak, bukan kerabat, tetapi kalau meninggal dunia turut kehilangan. ( Ibid )

Bertolak dari Pancasila itu dapat ditekankan bahwa baik dibidang kenegaraan maupun di bidang kemasyarakatan bangsa Indonesia menempatkan kekeluargaan sebagai acuan pokok. Ini berarti bahwa bagi warga bangsa dan negara, dimensi sosialitas (kemasyarakatan) dalam perikehidupan ditempatkan dalam kedudukan sangat penting. Penjabaran pokok pikiran kekeluargaan dalam konteks kekuasaan negara dan pemerintahan tertera dalam Undang-Undang Dasar cq UUD 1945. Terbaca dalam ketentuan-ketentuan pokok konstitusi misalnya "bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat". Diketahui bersama bahwa dalam mengusahakan kemakmuran itupun ditempuh melalui cara musyawarah mufakat yang dinyatakan dalam sila keempat Pancasila. Tujuannya bukanlah kemakmuran orang seorang melainkan guna mencapai "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Demikian pula adanya hak milik di negeri kita diatur sedemikian rupa, sehingga tidak bersifat absolut - Liberalistik, melainkan mempunyai fungsi sosial. Di lain pihak prinsip kekeluargaan itu identik dengan prinsip kolektivitas seperti tercermin dalam hukum adat di kalangan bangsa kita. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam sejarah kebudayaan Indonesia, kuat sekali pertanda adanya kurun waktu yang cukup panjang dalam memelihara dan mengembangkan etos kekeluargaan tersebut.

"Pancasila sebagai formula Ideologi Kebangsaan dapat dilihat sebagai kontinuitas dari substrat-substrat kultural original kebudayaan Indonesia, yang telah membentuk sistem hukum adat Indonesia sebagai "a type of Law" (Dr. A. M. W. Pranarka, 1985)

### Bangsa dan Kemerdekaannya

Apabila masyarakat Indonesia sekarang menikmati suasana kemerdekaan selama 45 tahun lamanya, kiranya patutlah dikenang adanya serangkaian perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu tidak sekedar nostalgia terhadap apa yang sekarang sudah lewat, melainkan akan menjadi pengikat moral kebangsaan betapa masyarakat Indonesia ini dapat dipahami seutuhnya hanya dalam konteks sejarah.

Kesadaran sejarah terasa penting bagi setiap generasi masa kini. Pertama, dengan kesadaran sejarah itu generasi sekarang tidak akan mengabaikan kenyataan bahwa berbagai kenikmatan pembangunan yang ada tidak dapat dilepaskan dari perjuangan dan pengorbanan generasi dahulu. Kedua, kesadaran sejarah juga dapat mensugestikan kehendak (karsa) untuk meneladani pengorbanan generasi lampau. Ini berarti bahwa kita sekarang harus menyiapkan kondisi yang lebih baik bagi generasi mendatang dengan cara mengembangkan semangat pengorbanan serupa dengan generasi terdahulu. Maka itu jika sejarah perjuangan kebangsaan ditengok kembali, dicamkan, dan direnungkan dengan baik kiranya dapat dijauhkan bangsa kita sekarang dari sikap-sikap individualistik dan egoistik.

Pengorbanan itu tidak saja tampak pada para pemimpin kebangsaan di abad XX, bahkan sekian raja



di abad-abad sebelumnya telah menunjukkan tekad dan pengorbanan dalam upaya memerdekakan negerinya. Demikian misalnya dicatat oleh Donald Wilhelm : "In one sense the Indonesian independence movement had begun even centuries before its final succes for example, in 1629 Sultan Agung Hanyokrokusumo, the head of the kingdom of Mataram, sent troops to attack Batavia (as Jakarta was called in Dutch days) but they were repulsed by the Dutch Governor General and his forces. In 1700 the Dutch suppressed a rebellion in Batavia itself. In 1825 Prince Diponegoro, the elder son of the Sultan of Yogyakarta mounted a sustained onslaught -- the great Javanese Revolt -- against the Dutch which it took them five years to put down. In 1838 began what became 30 year war to subjugate the northern Sumatra state of Aceh, whose practical activities had proved a headache for colonial powers. In 1906 and 1928 there were uprisings of Bali (Donald Wilhelm, 1980).

Alam Kemerdekaan yang mencungul sejak tahun 1945, hanyalah sebuah puncak gunung es yang di bagian bawahnya berdiri tegar gunung perjuangan yang sesungguhnya, yang penuh dengan darah dan nyawa manusia --bukan hanya pengorbanan harta benda. Jika kini dipertimbangkan kenyataan sejarah seperti itu, tidak akan terdapat alasan bagi kita untuk malas dalam kesertaan membangun negeri sendiri.

Masa itu jika bangsa kita kini hidup di alam kemerdekaan, kenyataan inipun membawa konsekuensi dengan segala implikasi sikap dan tindakan sosial yang harus diterima pula. Barang tentu akan ironis apabila kemerdekaan yang telah dengan susah diperjuangkan kini lebih terisi oleh manusia bersemangat "tidak merdeka".

Kesadaran kemerdekaan yang menyejarah itu dengan demikian akan memberikan keutuhan kepada masyarakat Indonesia hari ini agar setiap warga insaf akan apa yang seharusnya diperbuat bagi sebuah bangsa yang merdeka. Derivasinya akan sampai pada pembahasan berikut, bahwa setiap masyarakat mempunyai berbagai kebutuhan yang pemenuhannya diatur oleh negara.

## Manusia dan Kebutuhan Hidup.

Kebutuhan hidup merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, sebab begitu ia dilahirkan maka seorang manusia langsung dihadapkan kepada kenyataan bahwa ia membutuhkan segala sesuatu sebagai syarat hidupnya. Hidup, harus dipahami lebih dari pengertian statikanya -- bahwa ia hidup -- akan tetapi di dalamnya termuat dinaik inherent yang berupa sejumlah kondisi yang menyituasikan kehidupan itu sendiri. Adapun kebutuhan-kebutuhan hidup itu merupakan prakondisi ke arah situasi kehidupan yang menentukan kuat lemahnya eksistensi hidup. Maka itu hubungan antara kehidupan manusia dengan kebutuhan-kebutuhannya merupakan keniscayaan yang tak pernah dapat ditolak. Manusia yang hidup tanpa ia merasa mempunyai kebutuhan, tidak ada. Dalam kehidupannya kebutuhan itu akan terasa dan lebih dari itu ia mempunyai keharusan untuk memenuhinya.

Fenomena yang tak dapat dikesampingkan dalam konteks kebutuhan hidup itu -- lagi-lagi -- adalah fenomena kebudayaan. Ada banyak definisi yang merumuskan pengertian kebudayaan, yang telah dikumpulkan oleh dua orang ahli Kroeber dan Kluckhohn. "The most extensive examination of the concept of culture has been made by Kroeber and Kluckhohn. They first studies the history of the word culture and its meaning in various linguistic setting. They then surveyed the definitions of culture under the following headings : descriptive, historical, normative, psychological, structural and genetic" (Francis E. Merrill).

Dari sekian definisi kebudayaan itu salah seorang ahli, Malinowski menyebutkan bahwa "kebudayaan pada prinsipnya mendasarkan pada sistem kebutuhan manusia. Tiap tingkat kebutuhan itu menghadirkan corak kebudayaan yang khas, misalnya guna memenuhi kebutuhan manusia akan Keselamatan menimbulkan kebudayaan berupa perlindungan (Slamet Sutrisno, 1983).

Demikianlah dengan adanya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia mencoba memenuhkannya melalui kebudayaan, yang diciptakan tidak terutama melalui manusia sebagai individu melainkan dalam kebersamaannya sebagai kelompok masyarakat. Dalam hal ini muncul kembali fungsi sosial manusia yang harus

menyusun pikiran, tindakan dan sikap kolektif dalam kerangka kebudayaan tersebut.

### Kebutuhan Manusia Monopluralis.

Konsepsi manusia monopluralis seperti yang disebut di muka mengimplikasikan adanya berbagai kebutuhan yang berbeda-beda, namun yang akhirnya harus terpadu dalam sebuah keselarasan hidup. Berturut-turut akan dikupas dengan ringkas kebutuhan-kebutuhan yang dimaksudkan.

#### 1. Manusia sebagai makhluk jasmani-rokhani.

Kebutuhan jasmaniah manusia sering identik dengan kebutuhan primer berupa pangan, sandang dan papan. Ada yang menyebutkannya sebagai kebutuhan pokok yang pemenuhannya akan menuntut prioritas-prioritas tertentu. Kebutuhan pokok itu mempunyai dimensi fisik-materiil, dalam bentuknya yang kongkrit seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

Kebutuhan rokhaniah manusia sebaliknya bersangkutan dengan dimensi-dimensi nonfisik, yang tidak berujud secara kongkrit inderawi melainkan abstrak. Seorang ahli, Maslow, menaruh perhatian kuat pada kebutuhan ini.

"Maslow menandatangani kenyataan bahwa Kebutuhan imateriil merupakan suatu yang dasariah. Ia membaginya ke dalam empat kelompok : 1. perlindungan, ketenteraman, keamanan. 2. hak milik, persahabatan, kasih sayang, cinta. 3. respek, penghargaan, persetujuan, gengsi, harga diri. 4. kebebasan mengembangkan secara penuh bakat dan kemampuan, aktualisasi diri" (To Thi Anh, 1984).

#### 2. Manusia sebagai makhluk individu - sosial

Oleh karena dalam masyarakat identitas seorang warga -- yakni kepribadiannya -- tidak akan hilang, ia berhak atas keistimewaan tertentu berupa priveler dalam kebutuhan individualnya. Dalam dimensi individual inilah manusia berpeluang menumbuhkan karya dan kreativitas, yang hanya dapat terjadi apabila kebutuhan individual itu dipenuhi.

Sebaliknya setiap warga masyarakat akan

dihadapkan pula berbagai kebutuhan sosial, justru dalam rangka mempertegas identitas dan keberadaannya dalam masyarakat itu. Berbagai kebutuhan nonfisik yang disebutkan Maslow bersangkutan dengan kebutuhan individu dan kebutuhan sosial, dengan saling implikasinya antara satu dengan yang lain. Hak milik, Kebebasan dan aktualisasi diri adalah contoh kebutuhan individual, sedangkan cinta kasih merupakan contoh kebutuhan sosial manusia.

### 3. Manusia sebagai pribadi mandiri dan makhluk Tuhan.

Dari sudut hakekat kedudukan manusia, sebagai pribadi mandiri ia mempunyai kebutuhan tertentu yang akan membawanya ke arah mandiriannya itu. Optimalisasi dalam pemenuhan kebutuhan primer fisik materiil, maupun dalam kebutuhan nonfisik semisal kebebasan, menjadi syarat pentingnya melaksanakan kemandirian itu. Demikian pula sadar bahwa dirinya makhluk Tuhan, ia akan mempunyai kebutuhan religius dengan sifatnya yang transenden dan kudus.

### Peranan Masyarakat dan Negara

Plato mencatat adanya kaitan erat antara manusia dengan masyarakatnya. "The individual person cannot exist without society. Individual life in its purest form is conditioned by food, clothing, and other product of the arts, which can be provided only by the technical hierarchy of cooperative society. It is conditional further by the conditioned protections of this society against internal and external dangers" (John Wild, 1964).

Maka itu dapat dipahami bahwa masyarakat pada dasarnya menjadi medium, tempat bertemunya berbagai kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan itu dalam praktek tak jarang saling bertentangan dan bahkan berbenturan satu dengan yang lainnya. Bukan saja pertentangan antar individu sebagai sesama warga masyarakat, tetapi sering juga antara manusia individu dengan masyarakat dalam artian kelompok. Kebutuhan individual akan kebutuhan, kemungkinan akan bertentangan

dengan citarasa stabilitas dan Keselarasan masyarakat. Dalam hal demikian itu Kepentingan masyarakat umum biasanya menempati kedudukan di atas kebutuhan individu -- meski tidak berarti Keselarasan masyarakat akan menghilangkan Kebebasan individu.

Untuk itu masyarakat akan membangun norma-norma yang meminta kepatuhan warga guna menjunjung tinggi nilai - nilai yang hidup dan ingin dikembangkan daalam Kebudayaan masyarakat. Dalam perkembangan peradaban manusia kemudian dibentuklah organisasi sosial bernama negara. Oleh negara inilah kebutuhan-kebutuhan warganya diatur dan dipenuhi berlandaskan filsafat kenegaraan masing-masing. Pelaksanannya terwujud dalam peraturan-peraturan yuridis, perundang-undangan sampai peraturan hukum lainnya yang lebih rendah.

Oleh karena itu tiap-tiap warga akan melepaskan sebagian Kebebasannya dalam pengaturan hidup bersama itu dengan mempercayakannya kepada negara. Ini berarti bahwa mereka harus mematuhi ketentuan-ketentuan negara berupa undang-undang .

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan negara mempunyai peranan yang identik dalam rangka kebutuhan warganya. Di satu pihak masyarakat berperan sebagai medium kebudayaan yang mempertemukan berbagai kepentingan warganya, dan perjumpaan itu terwujud dalam Konsensus-konsensus nilai yang dipertegas dalam norma-norma kehidupan bersama. Di lain pihak negara menciptakan melalui aparaturnya yang memang dibentuk untuk itu, suatu imperatif hukum bagi tindakan warganya yang harus menghormati dan melaksanakan norma-norma sosial tersebut. Negara mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya dengan hukuman badan atau resiko lainnya secara positivistik. Sedangkan dalam lingkup masyarakat sanksi semacam itu juga ditemukan meskipun sifatnya moralistik, dengan pelanggarnya kemudian mendapat malu dalam artian etis.

### Pajak Sebagai Mobilisasi Dana

Negara, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pula yang melan-

dasi pelaksanaan tugas dan wewenang itu. Kebutuhan negara dalam artian ideal politik berupa kekuasaan dan kedaulatan, yang akan memberikan kepadanya kompetensi internal dan kehormatan eksternal. Sedangkan dalam artian praktis operasional negara membutuhkan tersedianya dana yang sebanding dengan runag lingkup tugas dan wewenangnya.

Bagi tersedianya kebutuhan praktis operasional itu segera dapat mewajibkan kepada warganya membayar pajak dengan layak, sebagai sumber yang seharusnya menjadi sokoguru pendapatan negara. Karena itu dibuat sejumlah peraturan di bidang perpajakan, agar sekalian warganya tahu bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban.

Ada beberapa alasan rasional mengapa pajak harus digalakkan dalam suatu negara, khususnya dalam tekanannya sebagai sarana mobilisasi dana itu.

#### 1. Berdikari.

Dalam ajaran masyarakat berkebudayaan Jawa, suatu saat apabila seseorang memasuki gerbang rumah tangga sedapat-dapatnya berusaha "mandireng-pribadi". Ini berarti bahwa dalam mengelola Kerumah-tanggaannya itu hendaknya berlangsung secara mandiri. Ia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dengan tidak menggantungkan nafkahnya kepada pertolongan pihak lain. Demikian pula halnya bagi rumah tangga yang disebut negara. Suatu negara yang merdeka dengan membentuk negara yang berdaulat, harus mampu menyelenggarakan kehidupan marganya atas biaya yang sebagian besar dipikul bersama. Salah satu bentuk kontribusi semacam itu adalah pajak, sebuah pungutan resmi yang pada gilirannya akan berjalan dan dipakai dari, oleh dan untuk warga itu sendiri. Tanpa kesadaran dan Kepatuhan warganya dalam membayar pajak negara akan hanya mengandalkan pendapatannya dari sumber alam atau pinjaman kepada warga lainnya.

#### 2. Tanggung jawab kepada negara

Pajak dapat dipakai sebagai tolok ukur rasa tanggung jawab warga masyarakat kepada negaranya.

Dengan pajak akan dibina perasaan ikut memiliki negara itu, yang mendorong melibatkan diri terhadap berbagai kebijaksanaannya. Orang tidak lagi bersikap apatis dan tidak peduli, melainkan secara lebih giat mengikuti jalannya negara dan dengan itu kepekaan sosial akan ditingkatkan.

### 3. Nasionalisme.

Keputusan membayar pajak kepada negara tidak langsung memupuk perasaan kebangsaan, karena dana yang dihimpun dari pajak dipakai untuk memenuhi kebutuhan bangsa itu. Warga yang tidak patuh dalam membayar pajak menunjukkan sikap anasionalis, karena ia dengan itu tidak mau tahu terhadap kebutuhan masyarakat dan mementingkan terpenuhinya kebutuhan sendiri. Barang siapa mengaku besar kecintaannya kepada tanah air dan bangsanya, ia akan membayar pajak dengan jujur dan benar. Ia sekaligus kuat kesadarannya terhadap sejarah kebangsaan, tahu bahwa berbagai kenikmatan masa kini hanya mungkin terjadi berkat pengorbanan generasi yang terdahulu.

### Fungsi Sosial Pajak.

Pada akhirnya dapat ditegaskan bahwa membayar pajak kepada negara mengandung di dalamnya suatu fungsi sosial yang kuat. Dalam konteks filsafat Pancasila pajak dapat diinterpretasikan sebagai sarana perwujudan prinsip kekeluargaan maupun sarana pencapaian terbentuknya masyarakat manusiawi.

#### 1. Prinsip kekeluargaan.

Seperti sudah disebutkan di bagian muka, keluarga adalah sel kemasyarakatan terkecil yang menyingkap sosialitas manusia. Dalam sebuah keluarga para anggotanya mewujudkan apa yang oleh Prof. Soediman Kartodiprojo disebut "perbedaan dalam kesatuan" dan "kesatuan dalam perbedaan". Meskipun masing-masing anggota keluarga berbeda dalam kemampuan, kebutuhan dan kedudukannya, mereka disatukan dalam garis senasib dan sepenanggungan. Maka itu prinsip kekeluargaan merupakan pengejawantahan spirit keluarga bagi suatu masyarakat kebangsaan.

Perpajakan yang adil menjadi bagian penting dari realisasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Masyarakat manusiawi.

Bila sektor perpajakan berhasil dibudidayakan dengan sekaligus mengembangkan semangat kekeluargaan, akan tersusunlah suatu masyarakat manusiawi. Ini berarti bahwa segenap masyarakat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa dukungan yang kuat sektor perpajakan, berbagai kebutuhan masyarakat sukar terpenuhi secara merata. Sebagian golongan masyarakat miskin yang layak mendapatkan pertolongan akan terlantar sebab negara akan kekurangan dan untuk memecahkan masalah itu.

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dengan benar bagi mereka yang mampu, kemanusiaan pada gilirannya akan terabaikan. Individualisme tumbuh leluasa dan perkembangannya akan memungkirkan dimensi sosialitas manusia. Fungsi sosial perpajakan merupakan bukti bahwa manusia pada dasarnya tak dapat hidup tanpa masyarakat. Dengan memahamkan fungsi sosial bagi lebih banyak lapisan masyarakat, orang-orang miskin akan tercukupi kebutuhannya dan terangkatlah martabat sebagai manusia.

//////////\*\\\\\\

### DAFTAR PUSTAKA

- Berten. K. 1976. Ringkasan Sejarah Filsafat, Kanisius, Yogyakarta.
- Clark, Gordon. H. 1957. Thales to Dewey, A History of Philosophy, The Riberside Press, Cambridge.
- Herbert, Marcuse, 1964., One Dimensional Man, Studies in the Ideology of Avanced Industrial Society, Beacon Press, New York.
- Kartohadiprodo, Sudiman, 1976. Beberapa Pikiran



Sekitar Pancasila Alumni  
Bandung.

- Merril, Fancis, E, 1957, Society and Culture, Englewood Cliffs, New York.
- Mubyarto, 1960. Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, Yayasan Agro Ekonomi-Ka, Jakarta.
- Notonagoro, 1967, Pancasila secara Ilmiah Populer CV Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Pranarka, A. M. W. , 1955 Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Yayasan Proklamasi, CSIS, Jakarta.
- Rousseau, J. J. a. b. Soemardjo, 1986. Kontrak Sosial, Erlangga Jakarta.
- Slamet Sutrisno, 1983. Sedikit Tentang Strategi Kebudayaan Nasional Indoensia, Liberty. Yogyakarta.
- To Thi Anh Paraeira, 1964. Nilai Budaya Timur dan Barat. PT Gramedia, Jaskarta.
- van Peursen, C. A. . Bertens. 1981. Tubuh Jiwa Roh BPK Gunung Mulis, Jakarta.
- Wild, John, 1964 : Plato's Theory of Man. Octagon Books. New York.
- Wilhelm, Donald, 1980 Emerging Indonesia. Cassel. Ltd. London.

Barang siapa yang mengetahui adalah pandai,  
tetapi yang mengetahui diri sendiri adalah lebih  
pandai.

Barang siapa dapat menguasai orang lain adalah  
kuat, tetapi yang dapat menguasai diri sendiri  
adalah lebih kuat. (Wisdom of the East).